



## **Kyai dan Politik : K.H. Mahfudz Ridwan dalam Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa 1998-2008**

**Muhammad Fairus Kadomi**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

*muhammadkadomi@gmail.com*

Submitted: 9 Agustus 2021	Revision Required: 19 Desember 2021	Published: 15 Juni 2022
------------------------------	----------------------------------------	----------------------------

### **Abstract**

The focus of the discussion in this research is about Kyai and Politics, the study of the role of K.H. Mahfudz Ridwan in the PKB. This article reveals how a kyai figure who has a role or contribution in a political party affiliated with an Islamic group. The method used in this research is the historical method. The dynamics of politics from the new order to the reformation era are historically important because the faucet of democracy will be opened, after which in the reform era several major parties emerged that characterize democracy in Indonesia. There are more and more Islamic political parties in the reform era and the contact of the kyai with politics is visible. K.H. Mahfudz Ridwan who is a kyai looks active in the social and political world. K.H. Mahfudz Ridwan is a figure who plays an active role in NU mass organizations, Islamic boarding schools, the world of social empowerment by being proven to have founded the Edi Mancoro Islamic Boarding School, Gedangan Forum, Desaku Maju Foundation and was involved in social politics during the Old Order until the reform era. The role of K.H. Mahfudz Ridwan appeared in the context of the formation of the PKB party, namely as an internal and external initiator of the PKB party.

**Keywords:** *Kyai, Political Islam, PKB, Mahfud Ridwan*

## **Abstrak**

*Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang Kyai dan Politik, studi tentang peranan K.H. Mahfudz Ridwan dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Artikel ini mengungkap bagaimana seorang tokoh kyai yang memiliki peran atau kontribusi dalam sebuah partai politik yang berafiliasi dengan kelompok Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Dinamika perpolitikan pada masa orde baru hingga reformasi adalah sejarah penting dikarenakan akan dibuka kran demokrasi, setelahnya pada era reformasi muncul beberapa partai besar yang mewarnai demokrasi di Indonesia. Partai politik Islam di era reformasi kian banyak dan persentuhan kyai dengan politik terlihat. K.H. Mahfudz Ridwan yang merupakan seorang kyai terlihat aktif dalam dunia sosial masyarakat dan politik. K.H. Mahfudz Ridwan merupakan seorang tokoh yang berperan aktif di ormas NU, pesantren, dunia pemberdayaan sosial dengan terbukti mendirikan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Forum Gedangan, Yayasan Desaku Maju serta terlibat dalam sosial politik ketika orde lama hingga era reformasi. Peranan Peran K.H. Mahfudz Ridwan muncul dalam konteks pembentukan partai PKB, yakni sebagai inisiator internal dan eksternal partai PKB.*

**Kata Kunci:** *Kyai, Politik Islam, PKB, Mahfud Ridwan*

## **PENDAHULUAN**

Reformasi politik telah berhasil menggulingkan rezim yang otoriter, monolitik dan militeristik sekaligus membuka jalan demokrasi dan transformasi sosial. Proses tersebut juga sering disebut dengan transisi demokrasi. Titik tolak dalam proses transisi terjadi pada tahun 1998 oleh peristiwa pemakzulan Presiden Soeharto setelah 32 tahun memimpin tanpa diganti sekalipun. Selama rezim Orde Baru, telah dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara berkala setiap lima tahun sekali. Namun, sepanjang kekuasaan Orde Baru, pemilu-pemilu yang dilaksanakan tidak berjalan secara demokratis, sebaliknya penuh dengan rekayasa dan intimidasi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, pemilu berjalan dengan demokratis, fair, dan kompetitif. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1999 dengan jumlah peserta pemilu sebanyak 48 partai politik. (Arya Hadiwiyata 1999)

Sekian banyak partai politik yang ada, era reformasi telah melahirkan peta kekuatan politik yang terfragmentasi. Pemenang pemilu berganti-ganti setiap pemilu dilaksanakan. Pada awal pemilu 1999, yang keluar sebagai pemenang pemilu PDIP, 2004 Partai Golkar, 2009 Partai Demokrat, 2014 PDIP dan terakhir di 2019 PDIP. Kehadiran partai-partai Islam era reformasi, dalam meraih dukungan pemilih muslim belum beranjak dari kekuatan seperti hasil Pemilu 1955 pada era demokrasi Parlementer. Dari 48 partai politik, terdapat 19 partai politik Islam yang berkontestasi dalam pemilu 1999, yaitu PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PP, PUI, PMB, PPIM, PID, PIB, PSII, PSII 1905, ONU, PKU, SUNI, KAMI, PAY, dan PUMI. (Romli 2019)

Di era reformasi, saat kedaulatan dikembalikan kepada rakyat, Nahdlatul Ulama (NU) tidak mengubah dirinya menjadi partai seperti yang terjadi pada tahun 1952, akan tetapi sebatas memfasilitasi didirikannya sebuah Lembaga politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terbukti dengan data perolehan pemilu 1999, dari partai Islam yang berkompetisi, PKB terbilang menjadi partai yang cukup sukses, melihat dalam proses didirikannya belum ada lima tahun tetapi mampu menghasilkan suara yang mengungguli partai Islam lainnya. (Arifin 2008)

Kiprah politik NU dalam kerangka khitah mengalami guncangan karena terjadinya peristiwa politik yang sangat menentukan, yaitu berhentinya Soeharto dari jabatan presiden. Kalangan nahdliyin (sebutan warga NU) merespons bahwa saatnya NU untuk berpolitik secara sehat dan menyuarakan NU melalui sebuah wadah partai politik. Dari berbagai usulan yang disampaikan berbagai kalangan termasuk akademisi, pengurus, perorangan, badan otonom hingga lembaga di lingkungan NU pun mengalir deras ke Sekretariat Jenderal Pengurus Besar NU dan fungsionaris Pengurus Besar NU di daerah, suara tersebut dialirkan melalui berbagai sarana komunikasi seperti telepon, telegram, surat, *e-mail*, dan faksimili. Dari sederetan usulan tersebut, yang cukup lengkap adalah draf yang dikemukakan oleh Lajnah Sebelas Rembang di bawah komando K.H. Cholil Bisri, begitu pula draf yang berasal dari Pengurus Wilayah NU Jawa Barat. Draf Rembang ini mencerminkan kerja keras dari sebuah tim yang melibatkan unsur ulama, politisi dan akademisi. Proses

penyusunannya berawal dari pertemuan di Pondok Pesantren Roudlatut Tholibin yang dihadiri sekitar seratus kyai pada pertengahan Juni 1998.(Asmawi 1999)

Peran kyai dalam kehidupan berpolitik menurut NU dan PKB adalah dipandang serta ditempatkan sebagai sosok yang suci, pewaris ajaran nabi dan segala tindak kelakuannya yang dianjurkan untuk diikuti. Selama ini, kyai dicap sebagai pemegang otoritas moral, pembawa pesan moral dan sebagai pengisi kerohanian bagi kaum muslim. Masyarakat kemudian mengamini akal hal tersebut dan menjadikan kyai atau ulama sebagai seorang tokoh dan panutan bagi kehidupannya.(Arifin 2008) Melihat anatomi PKB ialah ibarat melihat sebuah pondok pesantren. Sudah hal yang wajar mengingat isi dan latar belakang pendiri terdiri dari aktifis, akademisi, dan aktifis pondok pesantren, dari kyai hingga santri. Dalam kondisi tersebut, PKB adalah layaknya suatu kelompok yang identik dengan spirit religiusitas dan pendidikan tradisonalnya. Dari berbagai nama pondok pesantren, yang diantaranya Pondok Kaliwungu, Pondok Benda Brebes, Pondok Edi Mancoro, Pondok Roudlatut Tholibin, Pondok API Tegalrejo merupakan pondok pesantren yang telah identik kepada figur seorang kyai yang terkenal di Jawa Tengah. Salah satunya adalah pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang bernama K.H. Mahfudz Ridwan yang tak lain adalah teman dekat Gus Dur semasa kuliah di Kairo. Meskipun tidak secara langsung menjabat struktural di PKB, kyai ini adalah tokoh plural dan memiliki pengaruh yang besar. (Arifin 2008) Penulis tertarik untuk meneliti K.H. Mahfudz Ridwan dari sisi pemikiran politik yang digunakan hingga peran beliau dalam roda perpolitikan di Indonesia melalui sebuah Partai Kebangkitan Bangsa, apalagi beliau adalah sahabat Presiden Abdurahman Wahid yang sama-sama identik dengan ormas Nahdlatul Ulama'.

Beberapa hal yang dapat ditelusuri berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah Pertama, Partai Islam secara periodik telah ada dan berkembang dalam menghiasi demokrasi di Indonesia. Dinamika perpolitikan di Indonesia yang berubah-ubah menjadi sebuah kajian sejarah politik Islam yang menarik untuk diteliti., Kedua, dalam organisasi maupun elemen dari demokrasi terdapat seorang *leader*

atau pemimpin, *problem solving maker* atau tokoh solutor akan masalah-masalah yang ada, serta kendaraan politik yang disini objeknya adalah partai politik Islam dan subjeknya adalah Kyai. Ketiga, politik Islam telah ada sejak zaman Nabi dan bagaimana dinamika politik Islam yang beragam. Hal ini menjadikan antara Islam dengan Politik nyaris tidak dapat dipisahkan. Pengkajian peranan Kyai dalam topik kali ini yakni K.H. Mahfudz Ridwan dengan sebuah partai politik Islam PKB akan menambah penulisan sejarah biografis tokoh Islam serta politik Islam secara umum. Oleh karena itu, penulis akan melakukan kajian ilmiah dengan tiga problematika akademik atau rumusan masalah yakni ; Bagaimana Kyai dan Politik di Indonesia? Bagaimana biografi tokoh K.H. Mahfudz Ridwan? Bagaimana Peranan K.H. Mahfudz Ridwan dalam Partai Kebangkitan Bangsa 1998-2008? Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan dinamika perpolitikan kyai dan korelasinya dengan partai Islam terkhusus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengupas sejarah biografi tokoh K.H. Mahfudz Ridwan, serta menjelaskan peranan K.H. Mahfudz Ridwan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa selama beliau aktif dalam dunia sosial-politik di daerah maupun nasional.

Dari beberapa penelusuran literatur yang ada, peneliti mendapatkan beberapa tulisan terkait dengan tema politik Islam PKB atau Nahdlatul 'Ulama, yakni sebagai berikut ; (1) Tesis yang ditulis oleh Ichwan Arifin Program Studi Magister Ilmu Politik berjudul "Kyai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kyai dalam Konflik PKB Pasca Muktamar II Semarang" tahun 2008; (2) Buku yang ditulis oleh Hamid Bsyaid dan Hamid Abidin "Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu 1999-sampai pemilihan Presiden" tahun 1999 ; (3) Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia karya Tsaniyatul Azizah yang berjudul "Kuasa Kyai dalam Pemaknaan Partai Politik PKB di daerah DI Yogyakarta"; (4) Buku karya Asep Saeful Muhtadi yang berjudul "Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama:Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif" tahun 2004.

Setelah peneliti menganalisis beberapa literatur yang ada, ternyata perbedaan Pustaka dengan penelitian ini terletak pada lebih detailnya segi temporal dan spasial, serta subjek dari penelian lebih

fokus kepada kajian peranan dari seorang tokoh. Hal ini menunjukkan akan pentingnya penelitian ini, dikarenakan secara umum antara literatur yang peneliti temukan terdapat korelasi dengan tokoh, namun dari sudut spasialnya tentu terdapat perbedaan. Penelitian ini juga memberikan khazanah baru mengenai tokoh kyai di daerah-daerah yang tidak lepas peranannya dalam membangun sebuah habitat politik Islam secara global.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Soejono Soekanto. Teori ini digunakan karena menurut peneliti perangkat inilah yang dapat digunakan sesuai dengan kajian penelitian pada kali ini. Soejono Soekanto menerangkan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis pada sebuah kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai, maka ia telah menjalankan suatu peranan.(Badan et al. 2017) Pembagian peran juga disebutkan oleh Soejono Soekanto bahwa peran terbagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Dari uraian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang membatasi individu atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## **METODOLOGI**

Metode dalam melakukan penelitian ini adalah metode sejarah. Penggunaan dan penulisan sejarah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmu sejarah secara sistematis. Metode sejarah merupakan cara atau teknik merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah) (Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid 2011). Dalam penelitian ini dipergunakan sumber- sumber primer yang ditemukan oleh pelaku peristiwa yang masih dapat di wawancara, di perpustakaan, dari internet dan untuk arsip dapat diperoleh di Dewan Pembina Cabang PKB di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Ada 2 teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian lapangan yaitu: pengamatan dan wawancara. Dari beberapa yang sudah didapatkan

diantaranya buku mengenai proses pembentukan PKB dan peran kyai dalam membidani lahirnya Partai. Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan putra dari K.H. Mahfudz Ridwan yang juga merupakan penerus pondok pesantren Edi Mancoro. Selain itu, penulis bermaksud untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang menjadi figur dan tokoh NU di Jawa Tengah serta PKB di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Putra dari K.H. Mahfudz Ridwan dan Pengurus Wilayah PKB yang pernah berjuang dengan K.H. Mahfudz Ridwan. Penulisan sejarah dikenal dua macam sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang lain atau dengan alat mekanis. Sumber kedua adalah sumber sekunder, adalah merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi mata, yakni dari orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Kritik sumber merupakan verifikasi sumber yaitu pengujian kebenaran atau ketetapan dari sumber sejarah. Setelahnya, peneliti melakukan interpretasi atau analisis berdasarkan data-data yang diperoleh dan akhirnya dihasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya maka disebut tulisan atau karya sejarah. Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.. tahap terkahir adalah historiografi yang merupakan proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah.

## **PEMBAHASAN**

### ***Kyai dan Politik di Indonesia***

Menurut Ziemmek pengertian kyai secara terminologis adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim terpelajar yang membaktikan hidupnya demi Allah serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan-kegiatan Pendidikan Islam. Pada umumnya, masyarakat luas mengenal kyai dengan mangartikan bahwa seseorang yang mengetahui ilmu dan khazanah Islam atau ulama. Dalam kepopulerannya, kyai disebut dengan orang yang memiliki pengetahuan yang disinyalir oleh Al-Qur'an sebagai hamba-hamba

Allah yang paling takut dan orang-orang yang menjadi pewaris nabi (*al- ulama' waratsah al anbiya'*). (Eksan 2000)

Pada umumnya, kyai ialah seseorang yang memimpin pesantren, mengajarkan kitab kuning (kitab-kitab Islam klasik), serta memiliki keterikatan dengan kelompok Islam tradisional. Akan tetapi, dalam dinamikanya hingga sekarang pada abad 21, tidak sedikit ulama dan atau guru agama yang memberikan pengaruh di masyarakat sehingga mereka mendapatkan sebutan "kyai", meskipun mereka tidak memimpin pesantren. (Dhofier 2011)

Hubungan antara kyai dan politik merupakan sebuah tema yang sering diteliti, meski pada dasarnya para kyai ataupun ulama' tidak atau bahkan jarang terjun secara langsung dalam ranah kekuasaan. Meski demikian, fungsinya sebagai figur religious mengharuskan mereka bersentuhan dengan dunia sosial, politik ekonomi dan budaya. Kiprah kyai dalam dunia politik ini dimotivasi oleh ajaran Islam yang tidak hanya memerintahkan kaum Muslimin melaksanakan ajaran-ajaran yang berdimensi teologis-ritualistik, akan tetapi juga memberikan pedoman kepada masyarakat terkait dengan hal kehidupan sosial politis. Dalam konteks ini, kyai memiliki kewajiban bahwa demi mencegahnya paham yang berlawanan dengan syariat Islam. terkait dengan korelasi antara agama dan negara, kyai merasa memiliki kewajiban untuk mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan dan perilaku penguasa yang berseberangan dengan kehendak syariat.

Pasca kemerdekaan, kyai dan politik memiliki korelasi dan banyak memiliki organisasi yang mengatasnamakan suara kaum Islam. terbentuknya Masyumi pada Kongres Umat Islam di Yogyakarta, 7-8 November 1945 sebagai wadah politik tunggal umat Islam Indonesia. Umat Islam sangat antusias melihat Masyumi sebagai satu-satunya partai politik yang mewakili organisasi Islam yang ada, seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis. Masyumi baru ini berbeda dengan bentukan Jepang, karena masyumi baru didirikan umat Islam sendiri untuk memperjuangkan kepentingan politik Islam. Peran kyai dalam politik kemudian berkembang melalui diterapkannya sistem pemilu yang multipartai pada 1955. NU yang keluar dari Masyumi karena perbedaan pandangan yang muncul, kemudian

disusulnya deklarasi NU untuk menjadi partai politik kian menjadikan kyai memiliki kiprah di dunia politik.(Noeh 2014)

Di bawah rezim Orde baru, penyederhanaan partai berbasis Islam yang dituangkan kedalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), para kyai yang mayoritas warga NU tidak bisa menolak kebijakan dari rezim Orde baru. Orde baru pun juga membagi organisasi massa Islam non politik yang ditempuh melalui konfederasi semi-resmi bagi organisasi Islam yang ada. Hal ini bermula dibentuknya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) tahun 1969 melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 108/1969 tahun 1969 tanggal 4 September 1969 yang diketuai oleh K.H. Moh Ilyas . PDII ini menjadi awal cikal bakal terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 pada Musyawarah Nasional Majelis Ulama yang juga digagas oleh PDII ditahun 1970 dalam forum Musyawarah Alim Ulama seluruh Indonesia di Jakarta. (Noeh 2014)

Keterlibatan kyai di perpolitikan melalui partai merupakan sebuah komitmen pribadi yang diyakini melalui ideologi tertentu. Tentu saja ada hal lain diluar hal ideologis, pastinya terdapat nilai-nilai mengapa seorang kyai memiliki keterikatan atau komitmen terhadap pilihan politik. Di lain sisi, jelas bahwa kyai memiliki pengaruh yang kuat dan penting di tengah masyarakat. Melihat hal tersebut, tidak heran bahwa banyak kalangan yang memandang bahwa kyai adalah figur penting dalam kehidupan politik Indonesia. Peran kyai yang tidak semata-mata dalam masalah keagamaan tetapi juga dalam masalah-masalah sosial secara luas, semakin memperkuat pengaruhnya dalam dunia politik.

Ketika reformasi politik tahun 1998 yang melahirkan demokrasi yang ditandai dengan tingginya partisipasi publik dalam proses-proses politik, kyai semakin terlibat dalam kehidupan politik. Penegasan politik kyai kian menjadi setelah sejumlah kyai menjadi figur kekuatan moral dan penyelamat bangsa di era reformasi. Memang tidak semua kyai beralih menjadi politisi, banyak kyai yang tidak mau masuk ke dalam partai politik dan membangun politik sebagai seorang politisi. Meski demikian, kyai-kyai tersebut tetap menggunakan pengaruhnya

sebagai *non governing elite* dalam masalah politik. Peran yang dimainkan tetap dekat dengan proses politik kekuasaan.(Noeh 2014)

### **Biografi K.H. Mahfudz Ridwan**

K.H Mahfud Ridwan lahir dari pasangan KH. Ridwan dan Hj. Maimunah di Desa Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, pada tanggal 10 bulan Oktober 1941. Pendidikan dasar beliau ditempuh di desa Pulutan, lalu melanjutkan MTs dan Aliyah di kota Makkah. Selanjutnya, beliau kuliah di Baghdad University di jurusan Syariah dan Adab (Sastra). Yang mana pada waktu itu satu kamar bersama K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sejak kecil, lingkungan pesantren sudah tidak asing baginya. Melanjutkan studi ke negeri Arab dan Mesir menambah pengetahuan beliau yang mendalam tentang ilmu Islam, khususnya syariah dan sastra arab yang beliau geluti tak kurang dari 5 tahun. Pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2017 KH. Mahfud Ridwan dipanggil oleh Allah SWT. Beliau meninggalkan seorang istri yaitu Ny. Hj. Nafisah dan empat anaknya, tiga laki-laki dan satu perempuan yaitu Ir. Khamud Wibisono (Gus Wibi), Dr. Muna Erawati (Ning Muna), Sauqi Prayogo, S. T. (Gus Uqi), dan Muhamad Hanif, M. Hum (Gus Hanif).(Mancoro 2019)

Semasa kecilnya beliau bersekolah di sekolah rakyat Salatiga, lalu nyantri di Pesantren Watu Congol, Muntilan, Magelang, Pesantren Rembang, lalu pindah ke Ploso Kediri lalu pindah lagi ke Pesantren Rembang. Pada tahun 1961, KH. Mahfudz Ridwan menerima beasiswa di Universitas Ummul Quro Mekkah, dan menempuh Sekolah Menengah Atas selama 3 tahun. Pada tahun 1965, KH. Mahfudz Ridwan juga melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Baghdad selama 5 tahun yang juga teman karib dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. A. Mustofa Bisri selama menempuh pendidikan di Baghdad.(Umami 2016)

K.H. Mahfudz Ridwan telah lama menggeluti berbagai macam persoalan sosial di kalangan masyarakat. Berbagai keyakinan yang beda menurut beliau adalah hal yang harus disyukuri dan tidak menjadi permasalahan. Sebagai ketua **Forum Silaturahmi Umat Beragama (FSUB)**, K.H. Mahfudz Ridwan mengaktualisasikan pemahaman bahwa keanekaragaman keyakinan tidak menjadi sebuah kendala dalam berbangsa dan bernegara yang berujung pada

penciptaan kondisi sosial ekonomi politik yang adil bagi seluruh warga, siapapun itu. Gagasan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, tanpa mengenal sekat keyakinan itu, terus diupayakan oleh K.H. Mahfudz Ridwan melalui forum bersama yang berisikan orang dari berbagai latar belakang, yang berusaha untuk melakukan aktifitas pemberdayaan kemasyarakatan. Aktifitas yang pernah dirintis adalah **Forum Gedangan (FORGED)** yang mempunyai visi pemberdayaan masyarakat miskin atau *mustadh'afin* melalui berbagai kegiatan.(Mancoro 2019)

Semasa hidupnya KH. Mahfudz Ridwan ikut berperan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Kiprah beliau dalam dunia politik ditunjukkan ketika KH. Mahfudz Ridwan menjabat sebagai anggota DPRD dari partai PPP pada periode 1977-1982. Partai PPP sebagai ruang gerak dan menjadi motor penggerak bagi KH. Mahfudz Ridwan dalam menjalankan visi misinya sebagai anggota DPR. Sebagai seorang pejabat beliau mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Dalam upaya mengayomi masyarakat, KH. Mahfudz Ridwan bukan hanya mengayomi umat Islam sebagai sesama umat muslim namun beliau berupaya berlaku adil dengan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada pemilihan tahun 1997 partai ini mendapatkan 99 kursi DPR dan dari 99 kursi KH. Mahfudz Ridwan merupakan salah satu yang menduduki kursi DPR. KH. Mahfudz Ridwan memilih partai PPP sebagai alat mobilisasi politik disebabkan ideologi Islam yang diusung PPP sejalan dengan pemikiran politik dari KH. Mahfudz Ridwan.. KH. Mahfudz Ridwan memiliki pandangan bahwa kemajuan bangsa akan tercapai apabila kepentingan rakyat terpenuhi, sehingga kepentingan umum pada masa itu diutamakan.(Nurhuda 2008)

Perjalanan politik K.H. Mahfudz Ridwan memang tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya Matori Abdul Djalil. Dalam perjalanannya, pada era Orde baru tahun 1971 dibawah pemerintahan Soeharto melakukan banyak konsolidasi kekuasaan dengan menerapkan kebijakan massa mengambang melalui fusi partai. Partai NU yang menjadi pemenang kedua digabung dengan partai lain menjadi PPP. Saat itu tidak sedikit politisi NU yang loncat ke partai pemerintah atau

mengambil langkah pasif dengan menghindarkan diri dari aktivitas NU.(Nurhuda 2008)

Pada saat itu nyaris tidak ada yang mengurus NU Salatiga karena ketakutan berhadapan langsung dengan pemerintah setelah fusi partai. Saat demikian, Matori Abdul Djalil dan K.H. Mahfudz Ridwan mengumpulkan pengurus NU se-Salatiga untuk membahas nasib dan aset NU setelah fusi partai, akan tetapi dari 240 undangan yang hadir pada saat itu hanya 4 orang. Waktu itu orang tua sudah banyak yang lari dan tokoh muda belum muncul. Dalam membesarkan PPP pun K.H. Mahfudz Ridwan berusaha agar membesarkan PPP yang waktu itu transisi menjadi fusi partai. Pada awal perjuangannya, Matori dan kyai Mahfudz kesulitan mencari teman untuk berjuang. Bahkan dalam merekrut kader dan anggota, kegigihan Matori dan K.H. Mahfudz Ridwan kental dalam menyusuri desa hingga kecamatan dalam membesarkan PPP.(Nurhuda 2008)

Dalam bidang keagamaan beliau memiliki inisiatif mendirikan pondok pesantren. Sebenarnya sebelum beliau mendirikan pesantren, beliau terlebih dahulu mendirikan wisma santri yang berfungsi sebagai tempat belajar bersama tentang ilmu-ilmu keagamaan. Pandangan mengenai arah pembelajaran agama dituangkan ke dalam pengajarannya di pesantren. Pondok Pesantren Edi Mancoro berasal dari dua kata, yaitu "Edi" dan "Mancoro". Edi artinya bagus, dan Mancoro yang berarti bersinar. Bila digabung, artinya akan menjadi "sebuah pesantren yang diharapkan menjadi sebuah sinar yang bagus dan memancar ke seluruh penjuru dunia". Pesantren ini terletak di Dusun Bandungan, Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dan menempati tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup>.

KH. Mahfudz Ridwan mengupayakan mendidik santri dengan paradigma mengenai keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dalam pandangan beliau manusia harus meraih kebahagiaan dunia dan akhirat untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut maka diperlukan ilmu untuk mencapainya, sehingga santri harus mendapatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Salah satu peran yang ditampilkan Pondok Pesantren Edi Mancoro dalam bidang advokasi adalah pendampingan berbagai persoalan dan kasus yang terjadi di masyarakat. Pendampingan tidak hanya dilakukan

sekali, tetapi bertahap dan berkelanjutan. Selain melakukan pendampingan dan advokasi, Pondok Pesantren Edi Mancoro juga sering mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang toleransi, moderatisme, HAM, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai salah satu tanggungjawab pesantren terhadap perdamaian umat. Di antara inisiatif kegiatannya adalah: dialog lintas agama, diskusi dan silaturahmi antar agama yang bertujuan untuk menanamkan toleransi serta mempererat persaudaraan antar agama di tanah air.

Inisiatif perdamaian yang diinisiasi Pondok Pesantren Edi Mancoro dalam berbagai kegiatannya di antaranya sebagai berikut ; 1) Pendampingan korban kasus Waduk Kedung Ombo (WKO) tahun 1980-an. Pendampingan yang dilakukan secara psikis dan advokasi (bantuan hukum). Kendalanya karena Pondok Pesantren pada saat itu dijadikan sebagai markas tempat musyawarah dan penggodokan strategi pedampingan korban WKO. Akibatnya dicurigai oleh pemerintah dan dalam berbagai aksinya diintervensi oleh pemerintah. Untuk menangani masalah ini, pihak Edi Mancoro berusaha menjelaskan kepada pemerintah bahwa kegiatan apapun yang dilakukan di pesantren tidak ada yang perlu dicurigai atau dipandang membahayakan bagi pemerintah; 2) Pemberdayaan Yayasan Kristen Peru di Salatiga. Kegiatan ini dilakukan saat tahun 1993 dan 1994 di Peru sedang terjadi musibah kelaparan yang hebat, dan Pondok Pesantren Edi Mancoro mencoba memberikan pelatihan pemberdayaan secara mandiri kepada masyarakat Kristen Peru di Salatiga; 3) Penguatan pemberdayaan masyarakat dengan terbentuknya 63 kelompok kecil yang ada di masyarakat; 4) Pembentukan Forum Gedangan. Forum ini dibentuk akhir 1990-an saat reformasi bergulir. Pembentukan forum ini dilakukan karena terjadi ketidakmerataan pendistribusian sembilan bahan pokok (sembako) di Kota Salatiga dan sekitarnya. Ini dikarenakan merebaknya isu Kristenisasi dan Islamisasi di Salatiga; 5) Pembentukan Forum Lintas Iman yang diberi nama SOBAT. Forum SOBAT ini diinisiasi dengan tujuan untuk langkah pencegahan dan meminimalisir konflik serta isu-isu bernuansa SARA yang ada dan berpotensi berkembang di masyarakat; 6) Pendampingan konflik

antara gereja dan umat Islam di sekitar Salatiga dan Kabupaten Semarang; 7) Pendampingan konflik Temanggung (pembakaran gereja); 8) Halaqoh ulama dan santri; 9) Mengadakan diskusi lintas agama di Pesantren Edi Mancoro bersama tokoh lintas agama; 10) Pemberdayaan masyarakat lokal di Kecamatan Tuntang dalam mengatasi masalah tanaman enceng gondok yang hampir tidak terkendali di Rawa Pening, yaitu dengan membentuk pelatihan kelompok home industry kreasi enceng gondok.

### **Peranan K.H. Mahfudz Ridwan dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

PKB lahir pada masa transisi rezim orde baru menuju masa reformasi. Pada masa transisi inilah, banyak bermunculan partai baru yang lahir dari aspirasi warga NU. Dari empat partai yang sama-sama dilahirkan oleh warga NU; PNU, Partai SUNNI, PKU, dan PNU, hanya PKB yang kelahirannya difasilitasi dan dideklarasikan serta didukung sepenuhnya oleh PBNU. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya PKB, NU tidak dapat dipisahkan dari PKB.(Huda 2012)

Pembentukan PKB merupakan upaya jalan tengah dari warga NU untuk terus berjuang pada lini structural dengan berpihak dalam proses pembuatan kebijakan public yang berpihak kepada rakyat, seraya melakukan gerakan kultural melalui NU yang terus dipertahankan menjadi organisasi sosial keagamaan atau jam'iyah diniyyah seiring dengan perubahan yang terjadi di pentas politik nasional. Guna memberi landasan perjuangan PKB di sektor struktural, dirumuskanlah mabda; siyasi atau titik tolak politik dengan pendekatan fiqh siyasi untuk menerapkan nilai-nilai dan etika sosial Islam dalam bernegara, sebagaimana yang telah menjadi tradisi NU.(Iskandar 1998)

Politik ideologis kebangsaan yang digaungkan oleh K.H. Mahfudz Ridwan memang bersumber dari ajaran Nahdlatul Ulama dimana harus ada nilai *tasamuh*, *tawazun*, *tawasuth*, dan *i'tidal*. Semua yang terkandung dalam politik kebangsaan masyarakat haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemoderatan sehingga masyarakat dapat bermasyarakat secara adil, makmur dan sejahtera.(Muzayyin 2020)

Alasan K.H. Mahfudz Ridwan berpolitik adalah jelas, yakni untuk kesejahteraan umat. Kerap kali K.H. Mahfudz Ridwan memakai uang gaji PNS demi keberlangsungan kegiatan ke-NU-an di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Gerakan ke-PMIIan di kota Salatiga. Kyai Mahfudz tidak pernah membicarakan mengenai untung atau tidaknya kita, tetapi lebih bagaimana kemudian kita dapat bermanfaat bagi orang disekitar kita.(Muzayyin 2020)

Menurut K.H. Tadzkir Mansyur, tokoh NU di Kabupaten Semarang dan salah satu Dewan Syuro PKB yang juga teman seperjuangan K.H. Mahfudz Ridwan dalam pendirian PKB di Kabupaten Semarang, politik kebangsaan K.H. Mahfudz Ridwan yang digaungkan adalah politik kebangsaan yang sama seperti kyai lainnya, yaitu demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan bahwa orang-orang NU adalah orang yang baik, sehingga harus berperilaku baik.(Mansyur 2020)

Pergerakan para kyai dalam dunia politik telah menorehkan jejak panjang. Jejak tersebut telah ditapakkan sejak zaman kolonial Belanda. Didirikannya NU adalah tidak hanya didorong guna mempertahankan paham ahlussunnah wal jamaa'ah akan tetapi juga motif nasionalisme dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pergerakan politik para kyai kemudian berlanjut kepada masa kemerdekaan. NU bahkan sempat menjadi partai politik tersendiri setelah sebelumnya bergabung dalam partai politik Masyumi. (Arifin 2008)

Sejarah panjang tersebut memberikan gambaran bahwa relasi antara politik dan kyai nyaris tidak terpisahkan. Beragam asumsi menilai bahwa relasi keduanya memiliki perbedaan pandangan. Bagaimanapun juga relasi antara kyai dan dunia politik dalam kehidupan politik di Indonesia tetaplah menjadi hal yang menarik. Hal lainnya, PKB sebagai sebuah partai yang didirikan para ulama NU ternyata memiliki sejarah yang menarik.

K.H. Mahfudz Ridwan dalam perjalanan politiknya, merupakan seorang tokoh dan figure sebagai kyai di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Selain sebagai kyai yang memerankan peran dalam hal sosial

keagamaan, beliau adalah tokoh yang aktif di dalam dunia pemberdayaan sosial, lintas iman, dan sosial politik. Selain itu, hubungan K.H. Mahfudz Ridwan dengan PKB sangatlah dekat. Peran atau role merupakan proses dinamis kedudukan. Menurut Soekanto, peranan sosial mencakup 3 hal, antara lain ; meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; sebuah perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto 2009)

Peran K.H. Mahfudz Ridwan dalam Partai Kebangkitan Bangsa, seperti halnya diatas bahwa relasi antara kyai dengan politik terkhusus bagi seorang K.H. Mahfudz Ridwan selama berkiprah di dunia pesantren dan dunia sosial politik akan penulis jabarkan dalam beberapa hal, antara lain :

#### ***Peran dalam Pendirian PKB***

Jika berbicara mengenai PKB, maka pencetus PKB pada awalnya adalah K.H. Mahfudz Ridwan, K.H. Zaenal Arifin, dan Mathori Abdul Djilil melalui forum diskusi informal di Gedangan. Melihat fenomena pergerakan di tahun 1998, maka proses diskusi lebih intens, di mulai dari ngobrol ringan untuk mendirikan partai untuk orang NU. K.H. Mahfudz Ridwan adalah seorang pencetus awal, sebelum adanya PKB beliau sudah mempunyai fikiran untuk bagaimana caranya mendirikan partai khusus warga NU. K.H. Mahfudz Ridwan seperti halnya embrio awal, kemudian dilemparkan ke Jakarta melalui PBNU yaitu Gus Dur, setelahnya Gus Dur mengkonfirmasi lalu di matangkanlah oleh NU untuk kemudian menindaklanjuti pendirian partai. Hasil diskusi di Gedangan lalu diteruskan pada momentum berkumpulnya kyai-kyai di Rembang. Intinya adalah pembuatan partai untuk warga nahdliyin, yang dilatar belakanginya oleh tidak kondusifnya orang-orang NU di PPP dan tidak diakomodirnya orang-orang NU di dalam PPP. (Riyadi 2020)

Menurut K.H. Tadzkir Mansyur yakni tokoh NU dan PKB sekaligus teman seperjuangan dalam mendirikan PKB di Kabupaten Semarang, sebelum adanya PKB sebetulnya K.H. Mahfudz Ridwan

telah mempunyai pemikiran untuk memikirkan, mempunyai keinginan untuk mendirikan partai untuk warga NU. Pada suatu saat, beliau pernah menghubungi kyai di Rembang yakni K.H. Cholil Bisri dan K.H. Mustofa Bisri, serta K.H. Dimiyati Rois (Kaliwungu, Kendal). Semua itu atas usulan dari Matori Abdul Djalil yang sebelumnya sowan atau bersilaturahmi kepada K.H. Mahfudz Ridwan. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke Rembang lalu mengutus seseorang untuk mengajak K.H. Dimiyati Rois agar ikut bersama ke Rembang. Ketika di Rembang, K.H. Mahfudz Ridwan, Mathori Abdul Djalil, K.H. Dimiyati Rois, K.H. Cholil Bisri, dan Gus K.H. Mustofa Bisri berdiskusi untuk mendirikan partai untuk warga NU. Dikarenakan era orde baru telah usai dan kondisi politik pasca orde baru masih belum stabil, maka sudah dirasa saatnya NU mendirikan partai dan salah satu hasil diskusi di Rembang pun dijadikan rujukan. (Mansyur 2020)

Kala itu, di PKB terdiri dari beberapa poros, yakni Poros Tegalrejo, Poros Kaliwungu, Poros Rembang dan Poros Gedangan. Realita pada waktu itu, Mathori Abdul Djalil pernah berbicara kepada K.H. Mahfudz Ridwan bahwa di rezim Soeharto, kenyataannya di PPP yang notabennya partai Islam dengan mayoritas terdapat orang-orang NU didalamnya justru tidak mendapat perhatian khusus oleh pemimpin partai, justru orang Parmusi dan kubu selain NU lah yang mengucilkan orang NU, seperti minoritas memimpin mayoritas. Dikarenakan pasca Soeharto muncul banyak partai yang muncul, oleh karena itu mereka berfikir bahwa tepat saatnya orang NU mempunyai wadah partai khusus dan juga atas seizin atau persetujuan Gus Dur dan kemudian mengutus Matori Abdul Djalil agar dijadikan tim pekerja untuk mendirikan partai dalam menghimpun kekuatan di segala sektor. Akhirnya, setelah sekian banyak usulan yang diterima, berujung pada nama Partai Kebangkitan Bangsa yang terdiri dari kata *nahdhotul ummah* seperti Nahdlatul 'ulama agar membangkitkan bangsa. (Mansyur 2020)

Selanjutnya, menurut Haris seorang tokoh PKB Salatiga dan seorang santri K.H. Mahfudz Ridwan juga memiliki peristiwa yang terjadi dengan K.H. Mahfudz Ridwan, yakni kerap mengikuti beliau dalam awal pendirian PKB hingga beberapa event pasca terbentuknya PKB. Suatu saat, sebelum PKB muncul memang sistem

politik yang dibangun pada rezim Orde Baru bertindak sebagai rezim yang otoriter. Setelah digulingkan melalui berbagai elemen, yang di tandai dengan digantinya era reformasi maka dibukalah kran politik yang lebih bebas dan demokratis. Salah satu politisi besar bernama Mathori Abdul Djalil sering datang ke kediaman K.H. Mahfudz Ridwan.(Haris 2020)

Pada level Kabupaten Semarang, pendirian PKB diprakarsai oleh K.H. Mahfudz Ridwan dan K.H. Muntaha di Pondok Pesantren Roudlatul Furqon dan Gedangan, Kabupaten Semarang yang kemudian menyusun kepengurusan. Namun di lain tempat, terdapat penyusunan versi PCNU yang membuat dualisme kepengurusan. Akan tetapi yang disetujui oleh pusat adalah versi Gedangan. Pada akhirnya, kedua kubu pun bermusyawarah mengenai kepengurusan yang berujung dijadikan satu tanpa konflik. Jadi proses pendirian PKB memang murni diprakarsai oleh K.H. Mahfudz Ridwan dan K.H. Muntaha. Salah satu komposisi menjadi penggabungan antara kelompok NU dengan Gedangan terbukti dengan terpilihnya K.H. Mas'ud Blater yang pertama di Kabupaten Semarang sebagai penengah dan menghilangkan konflik diantara kedua kubu. (Riyadi 2020)

Jika di Salatiga, peran K.H. Mahfudz Ridwan dalam pendirian PKB Salatiga juga tidak dilepaskan. Apalagi adik beliau yakni K.H. Sonwasi Ridwan dan tokoh NU di Salatiga juga mempengaruhi. Pada proses-proses tertentu, rapat rapat dan penyusunan caleg pada tahun 1999 pun K.H. Mahfudz Ridwan juga memiliki peran dengan memberikan petunjuk kepada partai yang baru berdiri ini, dengan contoh K.H. Maghfur untuk diperintah K.H. Mahfudz Ridwan agar menjadi caleg.(Riyadi 2020)

Ketika membentuk PKB di Kabupaten Semarang dan kota Salatiga adalah atas izin dan persetujuan dari K.H. Mahfudz Ridwan. Setelah PKB di pusat telah terbentuk, maka di Kabupaten Semarang dan Salatiga pun ikut membentuk. Pada waktu itu, K.H. Mahfudz Ridwan meminta bantuan dari K.H. Tadzkir Mansyur untuk menghimpun kekuatan dan diutus untuk memetakan orang yang kemudian mempunyai kemampuan menjadi pengurus PKB di kabupaten Semarang. Setelah itu K.H. Mahfudz Ridwan beserta K.H.

Tadzkir Mansyur, K.H. Mas'ud, K.H. Muntaha, K.H. Ma'mun berangkat ke kediaman Gus Dur untuk menyetujui pendirian partai di Kabupaten Semarang dan alhasil berhasil. (Mansyur 2020)

### ***Mendidik Anak Muda Ideologis NU dan PKB***

Peran K.H. Mahfudz Ridwan memang tidak secara langsung dalam ikut serta membangun dan bersentuhan dengan politik, akan tetapi di sisi lain ada beberapa titipan atau pesan Gus Dur, yaitu meminta bantuan untuk mendampingi anak-anak muda ideologis dari Gus Dur seperti, Muhaimin Iskandar, Hanif Dzakiri, Abdul Aziz, Lukman Hakim dan masih banyak lagi untuk merawat PKB hingga saat ini. Peran dari anak didikan K.H. Mahfudz Ridwan memang hampir semuanya menjadi orang penting terhadap PKB, seperti Luqman Hakim, Arif Muzayyin, dan Hanif Dzakiri. (Muzayyin 2020)

Seorang tokoh dan santri K.H. Mahfudz Ridwan adalah Hanif Dzakiri. Pemikiran dan kiprah politik Hanif tak bisa dilepaskan dari komunitas NU, dunia pesantren dan lingkungan kyai yang merupakan jagad kecilnya, disamping komunitas kebangsaan Indonesia yang nota bene adalah jagad besarnya. Ini terjadi karena Hanif bukan saja lahir dalam keluarga NU yang mendidiknya dengan nilai-nilai dan tradisi ke-NU-an yang ketat, tetapi lebih dari itu karena ia juga sempat mengenyam pendidikan pesantren dengan mengaji kitab kuning dan bergumul dengan tradisi-tradisi komunitas pesantren. Ia tercatat sebagai alumni Pondok Pesantren Sirajul Muhlasin, Payaman Magelang asuhan KH. Muhlasin; Pondok Pesantren Al-Muayyad, Mangkuyudan Surakarta asuhan KH. Rozak Shofawi dan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan Kabupaten Semarang asuhan KH. Mahfudz Ridwan. Di pesantren itulah Hanif memperdalam wawasan keagamaannya dan menginternalisasi nilai-nilai dan kultur NU yang menurutnya sangat arif terhadap kehidupan dan realitas sosial masyarakat. (PKB 2015)

Dalam mendidik generasi muda atau calon para kyai, gus gus, K.H. Mahfudz Ridwan memberikan pintu gerbang untuk kemudian bisa mengembangkan kemampuan di bidang yang dirasa kompeten pada seseorang. Intinya adalah bekal yang digunakan mampu untuk memperkuat pesantren, pengetahuan dari para kyai muda di dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan pesantren tidak boleh

diam. Ada hubungan yang relevan antara pesantren dan masyarakat, karena pesantren harus memahami keadaan masyarakat, dan masyarakat juga harus memahami dunia pesantren sehingga mampu melengkapi dari sisi ilmu pengetahuan dan kontribusi dari kedua belah pihak.(Haris 2020)

### **Merawat PKB**

PKB adalah tuntutan warga NU untuk mendirikan sebuah partai. Sehingga PBNU membentuk tim Sembilan atau tim Asistensi dan tim Lima atau Tim Mantap. Selain itu, juga terdapat tim Istikharoh terdiri dari, K.H. Ilyas Ruchiyat, K.H. Munasir, K.H. Muchid Muzadi, K.H. Munasir, Gus Mus. Lambang partai dan gambar partaipun hasil dari istikharoh para kyai. Peran K.H. Mahfudz Ridwan dalam pendirian PKB di Kabupaten Semarang sangatlah besar. K.H. Mahfudz Ridwan menjadi salah satu rujukan untuk mendirikan sebuah partai dari warga NU. Karir politik K.H. Mahfudz Ridwan yang paling tinggi adalah menjadi Wakil Ketua Dewan Syuro PKB.(Muzayyin 2020)

Terkait pendirian dan kebesaran PKB di Kabupaten Semarang, Salatiga bahkan Jawa Tengah tak lain juga kontribusinya dari K.H. Mahfudz Ridwan. Rumusan terbesar PKB adalah rumah politik bagi warga NU. Dalam rangka membangkitkan semangat NU, maka untuk membesarkan NU harus merumuskan dengan salah satunya membangkitkan khittoh agar pada masa rezim Soeharto NU tidak diinjak-injak, mungkin kurun waktu 1984-1999 yang dirumuskan oleh Gus Dur. Hubungan Tim Lima dan Tim Asistensi secara langsung memang tidak secara langsung berhubungan dengan K.H. Mahfudz Ridwan, akan tetapi semua itu hasil dari rekomendasi, hasil *tabayyun*, hasil *istikharoh* dan kemudian di takliqkan oleh para kyai, termasuk K.H. Mahfudz Ridwan.(Muzayyin 2020)

K.H. Mahfudz Ridwan berperan besar, karena pernah menjadi Dewan Syuro PKB ketika Mathori Abdul Djalil menjadi ketua PKB Pusat. Karena K.H. Mahfudz Ridwan sudah konsentrasi di Pondok Pesantren, jadi tidak terlalu aktif 100% untuk mengikuti kegiatan partai, mungkin hanya beberapa terlibat pada event-event Muktamar, Rapat Pengurus, dan kegiatan yang mungkin melibatkan beberapa tokoh dan kyai. Rapat partai pun juga sering dilaksanakan di kediaman K.H. Mahfudz Ridwan pada level PKB Kabupaten

Semarang, misalnya pada perhelatan Pilkada untuk memilih dan konsultasi mengenai pilihan PKB untuk kemudian memberi dukungan kepada bakal calon. Saya yakin proses pada politik kekuasaan, pasti seorang K.H. Mahfudz Ridwan memiliki peran diantaranya untuk meminta pertimbangan di level daerah bahkan nasional, karena K.H. Mahfudz Ridwan merupakan tokoh nasional dan tokoh PKB yang dituakan dan tidak dapat dipisahkan. (Asrofi 2020)

Pada tahun 2008, K.H. Mahfudz Ridwan ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB dan di 2005-2020 menjadi Mustasyar PBNU. K.H. Mahfudz Ridwan telah wafat di tahun 2017 dikarenakan menderita penyakit. Tentu dengan hadirnya K.H. Mahfudz Ridwan adalah selain sebagai figur kyai, melaikannya sebagai pengemong umat, tutur K.H. Mustofa Bisri ketika menyampaikan pidato kehormatan terakhir bagi K.H. Mahfudz Ridwan. (Republika 2019)

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks sosial politik, kyai memiliki kewajiban bahwa demi mencegahnya paham yang berlawanan dengan syariat Islam. Keterlibatan kyai di perpolitikan melalui partai merupakan sebuah komitmen pribadi yang diyakini melalui ideologi tertentu. K.H. Mahfudz Ridwan telah lama menggeluti berbagai macam persoalan sosial di kalangan masyarakat. Gagasan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, tanpa mengenal sekat keyakinan itu, terus diupayakan oleh K.H. Mahfudz Ridwan melalui forum bersama yang berisikan orang dari berbagai latar belakang, yang berusaha untuk melakukan aktifitas pemberdayaan kemasyarakatan. K.H. Mahfudz Ridwan memulai aktivitas sosial yang berorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang bersama tokoh lain seperti H. Matori Abdul Djalil, H. M Sholeh dan lain-lain. Semasa hidupnya KH. Mahfudz Ridwan ikut berperan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Kiprah beliau dalam dunia politik ditunjukkan ketika KH. Mahfudz Ridwan menjabat sebagai anggota DPRD dari partai PPP pada periode 1977-1982. Perjalanan politik K.H. Mahfudz Ridwan memang tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya Matori Abdul Djalil.

Politik sosial kebangsaan menurut K.H. Mahfudz Ridwan adalah politik yang berhaluan atau berideologi Ahlussunnah wal

jamaah. Artinya adalah mengimplementasikan ajaran-ajaran NU dalam hal yang bersifat praksis yaitu politik, tapi tentunya memisahkan partai politik dengan NU, karena NU adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan. K.H. Mahfudz Ridwan menyampaikan kepada santri bahwa dimanapun kita berada, kita harus mengabdikan kepada umat, entah itu dimana saja dan dalam segala lini kehidupan. Jika berbicara mengenai PKB, maka pencetus PKB pada awalnya adalah K.H. Mahfudz Ridwan, K.H. Zaenal Arifin, dan Mathori Abdul Djilil melalui forum diskusi informal di Gedangan. Melihat fenomena pergerakan di tahun 1998, maka proses diskusi dilakukan dengan lebih intens, di mulai dari ngobrol ringan untuk mendirikan partai untuk orang NU. K.H. Mahfudz Ridwan adalah seorang pencetus awal, sebelum adanya PKB beliau sudah mempunyai fikiran untuk bagaimana caranya mendirikan partai khusus warga NU. Hubungan Tim Lima dan Tim Asistensi secara langsung memang tidak secara langsung berhubungan dengan K.H. Mahfudz Ridwan, akan tetapi semua itu hasil dari rekomendasi, hasil tabayyun, hasil istikharoh dan kemudian di takliqkan oleh para kyai, termasuk K.H. Mahfudz Ridwan.

Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, tentu banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya adalah mengerti akan dinamika demokrasi di Indonesia. Mengenai hubungan sosial politik, kita akan mengerti dinamika suatu bangsa dan kemudian di waktu yang akan datang generasi muda lah yang akan meneruskan perjuangan orang tua terdahulu. Peran kyai dalam perpolitikan tentu muncul berbagai macam pandangan kepada seorang tokoh kyai. Sebagai insan akademis, kita perlu belajar dalam konteks keilmuan kyai ketika memberikan ilmu kepada murid-muridnya dan tentunya ilmu agama itu sendiri. Terlepas dari itu, keilmuan seorang kyai tentu banyak sebab yang melatar belakangi, salah satunya adalah kepentingan umat. Dalam melaksanakan tugasnya, kyai memiliki pengaruh yang besar dalam konteks kemasyarakatan. Jika di konteks politik, mungkin ada beberapa orang yang kurang setuju, akan tetapi itu semua tergantung kepada pola fikir kita dan seberapa dalam kita memahami hal tersebut.

## **REFERENSI**

Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. 2011. *Pengantar*

- Ilmu Sejarah*. Cetakan I. Yogyakarta: Ombak.
- Arifin, Ichwan. 2008. "Kyai Dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kyai Dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Muktamar II Semarang." 157.
- Arya Hadiwiyata. 1999. "Partai Politik Bernuansa Agama Di Era Reformasi." *Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI* 23.
- Asmawi. 1999. *PKB Jendela Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Asrofi, Wawancara dengan Muh. 2020. "Wawancara Dengan Muh Asrofi, Seorang Santri K.H. Mahfudz Ridwan Dan Politisi PKB Jawa Tengah Di Grogol, Kecamatan Sidomukti, Salatiga Pada Tanggal 6 Maret 2020, Pukul 18:30 WIB."
- Badan, Peran, Perencanaan Pembangunan, Daerah Dalam, Rpjmd Kota Tomohon, Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M. Ruru. 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* 4(48).
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. 9th ed. Jakarta: LP3ES.
- Eksan, Moch. 2000. *Kiai Kelana: Biografi K.H. Muchidz Muzadi*. Yogyakarta: Lkis.
- Haris, Wawancara dengan Muh. 2020. "Wawancara Dengan Muh. Haris, Ketua PKB Salatiga Ke-2 Dan Santri Dari K.H. Mahfudz Ridwan Di Blotongan, Salatiga, Pada 22 Februari, Pukul 20:07 WIB."
- Huda, Syaiful. 2012. *Membuka Jalan Menuju Konsolidasi Politik*, Bandung: Pustaka Politik Incres.
- Iskandar, A. Muhaimin. 1998. "PKB: Politik Rahmatan Lil 'Alamin" Sahar L. Hassan (Eds), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi Dan Persepsi*. Gema Insani.
- Mancoro, Edi. 2019. "Biografi Muassis." Retrieved (<http://www.edimancoro.or.id/category/muassis/>).
- Mansyur, Wawancara dengan K. H. Tadzkir. 2020. "Wawancara Dengan K.H. Tadzkir Mansyur, Seorang Tokoh Dewan Syuro PKB Dan Teman Seperjuangan K.H. Mahfudz Ridwan, Di Sragen,

- Kabupaten Semarang Pada Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 20:25.”
- Muzayyin, Wawancara dengan Arif. 2020.“Wawancara Dengan Arif Muzayyin Seorang Santri Dan Aktifis PKB Kabupaten Semarang Dan Wilayah Jawa Tengah Di Susukan, Kabupaten Semarang Pada 12 Februari 2020 Pukul 13:44 WIB.”
- Noeh, Dr. Munawar Fuad. 2014. *Kyai Di Panggung Pemilu: Dari Kyai Khos Sampai High Cost*. Cetakan 1. Jakarta Selatan: Rene Book.
- Nurhuda, Mahrus Ali dan M. F. 2008. *Pergulatan Membela Yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- PKB, Fraksi. 2015. “Diakses Melalui Web : <https://www.fraksipkb.com/m-hanif-dhakiri/> Pada 10 Maret 2020 Pukul 14.21 WIB Di Salatiga.”
- Republika. 2019. “Ribuan Umat Antar Kiai Pengemong Ke Peristirahatan Terakhir Dikutip Dari Situs <http://m.republika.co.id/amp/oqq015396>, Diakses Pada 25 Deseember 2019, Pukul 19.05 WIB.”
- Riyadi, Wawancara dengan Slamet. 2020.“Wawancara Dengan Sekjend PKB Kabupaten Semarang Pertama Slamet Riyadi Di Kabupaten Semarang Pada 8 Maret 2020, Pukul 21.30 WIB.”
- Romli, Lili. 2019. *Pemilu Era Reformasi Dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*. Cetakan I. edited by Efriza. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umami, Emma Asyrotul. 2016. “Biografi Dan Pemikiran Dalam Perkembangan Masyarakat Islam Menurut K.H. Mahfudz Ridwan.” IAIN Salatiga.